

INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA: FAKTOR PENENTU PENDAPATAN DAN KEPUASAN HIDUP PADA 1993 -2014

SYARIF AS'AD

syarif_asad@umy.ac.id

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

SOBAR M. JOHARI

sobar@umy.ac.id

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat inklusi keuangan terhadap kesejahteraan keuangan (*financial well-being*) dan melibatkan berbagai variabel kontrol guna menjelaskan fenomena secara optimal. Tingkat inklusi keuangan digambarkan **melalui akses pembiayaan/kredit usaha, memanfaatkan berbagai produk tabungan maupun asuransi untuk kegiatan produktif termasuk investasi**. Variabel kesejahteraan keuangan (*financial well-being*) diproses dalam 2 model yaitu indikator objektif pendapatan, dan subjektif kepuasan hidup individu. Data diperoleh dari hasil pemetaan sumber data *Indonesia Family Life Survey* (IFLS), pengolahan dilakukan dengan model estimasi *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Inklusi keuangan memberi pengaruh yang signifikan terhadap *financial well-being* masyarakat di Indonesia dari tahun 1993-2014, (2) Variabel kontrol jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, gejala penyakit, kepemilikan rumah, *dummy_urban*, dan *region* masing-masing mampu mempengaruhi *financial well-being* masyarakat di Indonesia baik terhadap variabel pendapatan maupun kepuasan hidup, (3) Variabel kontrol status pernikahan dan kepemilikan listrik masing masing tidak memiliki pengaruh terhadap *financial well-being* masyarakat di Indonesia.

Kata kunci; literasi keuangan; inklusi keuangan; keuangan inklusif; *financial well-being*.

LATAR BELAKANG

Setelah krisis keuangan tahun 2008 *issue* tentang *financial well-being* menjadi salah satu topik yang cukup populer. Pertama, *financial well-being* menggambarkan kondisi keuangan individu atau rumah tangga baik dari segi pengeluaran, tabungan dan hutang, serta ketahanan terhadap guncangan. Kedua, *financial well-being* berkaitan erat dengan perilaku keuangan secara berkesinambungan (Hamilton, et al. 2017). Ketiga, terdapat hubungan positif antara *financial wellbeing* dengan kesejahteraan secara keseluruhan (Bruggen, et. al., 2017). Van Praag dan Frijters (2003) misalnya, menemukan bahwa belanja kesehatan dan tabungan merupakan aspek penting dalam kesinambungan keuangan dalam jangka panjang dan kesejahteraan individu. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan yang baik khususnya dalam pemenuhan kebutuhan, tabungan dan hutang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan berdampak pada kesejahteraan individu atau rumah tangga.

Studi yang dilakukan oleh Hamilton dkk (2017) menunjukkan bahwa tiga dimensi utama dari *financial well-being* adalah pemenuhan kebutuhan dan uang sisa, kontrol harian atas keuangan, serta perasaan aman akan kondisi keuangan. Tentu saja ketiga dimensi tersebut akan tercapai ketika individu atau rumah tangga memiliki pengetahuan atau **literasi keuangan** yang baik. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam perilaku dan keputusan keuangan individu atau rumah tangga. Individu dengan literasi keuangan yang rendah cenderung memiliki permasalahan dengan hutang (Lusardi dan Tufano, 2009), akumulasi kekayaan (Hilgert, et al, 2003), serta perencanaan pensiun yang tidak baik (Lusardi dan Mitchel, 2009). Selain itu, orang yang memiliki kontrol diri yang lebih baik cenderung merasa lebih aman dan tidak cemas terhadap situasi keuangan saat ini dan dimasa mendatang Stromback et al. (2017). Secara keseluruhan, literasi keuangan merupakan bagian terpenting dalam pencapaian *financial well-being* (Vosloo, et al. 2014).

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 indeks literasi keuangan secara nasional adalah 21,8%, dengan demikian dari 100 orang penduduk Indonesia baru 22 orang yang memiliki tingkat literasi yang baik. Indeks literasi di setiap wilayah juga cukup bervariasi dan terjadi ketimpangan yang cukup tinggi, DKI Jakarta misalnya yang menempati urutan pertama memiliki indeks sebesar 40% sedangkan Papua Barat diposisi terendah hanya sebesar 19,3% (OJK, 2017). Pada waktu yang bersamaan Indonesia termasuk ke dalam 10 negara tertinggi dengan perencanaan *financial well-being*. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Master Card Index of Financial Literacy, terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam hal perkembangan komponen perencanaan keuangan di Indonesia, dari 70 poin

menjadi 78 poin (Kontan, 2016). Angka ini menunjukkan bahwa ada upaya serius dari masyarakat untuk mencapai *financial well-being*.

Meskipun dalam level global kajian tentang *financial well-being* cukup populer, namun di Indonesia masih belum banyak ditemukan literature terkait. Diantaranya adalah Aulia et al. (2019) yang menganalisis pengaruh literasi keuangan dan *financial well-being* penduduk usia pensiun. Namun, penelitian ini hanya terfokus pada Kota Bandar Lampung dan kabupaten Pringsewu dengan jumlah sampel yang relative kecil. Penelitian Anastasia Yolanda (2019) mengukur keterkaitan antara pembelian impulsif dan *financial well-being* pada wanita awal karir, penelitian ini terbatas pada gender, usia dan lingkungan perusahaan tertentu di Surabaya, Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi terhadap *financial well-being* dengan sampel yang lebih luas, yaitu seluruh penduduk di Indonesia dengan menggunakan data dari *Indonesia Family Life Survey* (IFLS).

TINJAUAN PUSTAKA

Literasi Keuangan

Literasi dalam bidang ekonomi sering disebut literasi keuangan sebagai satu elemen penting untuk menggerakkan roda perekonomian lebih cepat. Masyarakat dengan tingkat literasi yang tinggi memiliki potensi kontribusi ekonomi melalui produktivitas yang lebih tinggi, maka dengan itu setiap negara melakukan strategi guna meningkatkan literasi masyarakatnya dalam bidang ekonomi atau keuangan ini. Literasi keuangan nasional setiap negara memiliki istilah yang berbeda-beda meski sebagian besar negara menggunakan istilah edukasi keuangan (*financial education*) dan literasi keuangan (*financial literacy*) dan hanya sebagian kecil saja menghubungkan dengan kebijakan perlindungan konsumen (*consumer protection*) (Grifoni dan Messy, 2012). Sedangkan World Bank (2014) mengistilahkan literasi keuangan dengan *financial capability* (kemampuan keuangan) dengan menitikberatkan pada perilaku dan interaksi antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap keuangan.

Literasi keuangan menurut *Organization Economic Co-operation and Development* (OECD) mengartikan *a combination of awareness, knowledge, skills, attitude and behaviours necessary to make sound financial decisions and ultimately achieve individual financial well-being* (Atkinson dan Messy, 2012). Sedangkan peraturan OJK No. 76 tahun 2016 mengartikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (POJK, 2016).

Keuangan Inklusif

Pada dasarnya keuangan inklusif merupakan seluruh upaya yang diarahkan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat pada pemanfaatan layanan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau. Dalam peraturan OJK keuangan inklusif didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (POJK, 2016). Sedangkan menurut Consultatif Group to Assist the Poor-Global Partnership for Financial Inclusion (CGAP-GPFI, 2011) mendefinisikan keuangan inklusif sebagai “*state in which all working age adults, including those currently excluded by the financial system, have effective acces to the following financial service provided by formal institution: credit, saving, payments, and insurance*”. ‘*Effective acces*’ dimaknai sebagai sebuah akses yang cepat, mudah, dan terjangkau bagi konsumen dan tetap menguntungkan bagi lembaga jasa keuangan dan termasuk efektivitas dalam menjangkau masyarakat yang belum mengakses lembaga keuangan lebih memilih lembaga formal dari pada lembaga keuangan informal.

Disebutkan dalam POJK komponen sebagai tujuan peningkatan keuangan inklusif yaitu akses, ketersediaan, penggunaan dan kualitas dengan penjabaran sebagai berikut, *pertama*: meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan; *kedua*: meningkatnya penyediaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; *ketiga*: meningkatnya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; *keempat*: meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Strategi Literasi dan Inklusi Keuangan

SNIK dan SNLKI dilatarbelakangi adanya hasil survey nasional OJK tahun 2013 yang menghasilkan indeks literasi (pengetahuan, kemampuan, dan keyakinan) dan indeks inklusi (penggunaan) keuangan. Dan pada tahun yang sama OJK juga menyelesaikan peraturan OJK (POJK) nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen yang di dalamnya terdapat klausul kewajiban kepada seluruh lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK untuk melaksanakan edukasi kepada para nasabah dan masyarakat yang bertransaksi di sektor jasa keuangan.

Mengacu pada hasil survey nasional 2013, dan setelah terbit pedoman pelaksanaan program edukasi yang secara garis besar materi edukasi mencakup pengenalan OJK dan lembaga jasa keuangan, mengenal produk dan layanan disertai

memerhatikan manfaat dan risikonya, mengelola uang dan perencanaan keuangan dan mewaspadai investasi ilegal. Evaluasi pelaksanaan program edukasi tahun 2013-2015 menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah dalam merevisi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tanggal 1 September 2016 yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 82, yang diantaranya menetapkan indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia harus mencapai target 75%.

Strategi literasi dan inklusi keuangan menyoal target yang tinggi dengan harapan memiliki manfaat yang setinggi mungkin baik bagi individu, lembaga jasa keuangan dan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan stabilitas sistem keuangan.

1. Individu

Literasi keuangan melalui program edukasi bertujuan meningkatkan pemahaman, ketrampilan, dan kepercayaan individu yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan menggunakan produk dan layanan keuangan. Selain itu dengan pengetahuan literasi yang baik maka seseorang akan memiliki pertimbangan yang matang tentang manfaat, risiko, dan biaya atas produk dan layanan jasa keuangan. Seseorang dengan tingkat literasi yang tinggi akan memiliki daya saing yang tinggi, hal inilah yang membentuk keyakinan dan kepercayaan atas pilihan dalam menggunakan produk dan jasa layanan keuangan formal.

Bagi keluarga, bagi kelompok pekerja edukasi keuangan dapat membantu memberikan pemahaman bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan memastikan mereka mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hasil penelitian Klaper, Lusardi dan Panos (2012) menjelaskan bahwa kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan keuangan akan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan pribadi. Sarma dan Pais (2008) menjelaskan tingkat pembangunan manusia dan tingkat inklusi keuangan memiliki hubungan positif, sehingga diartikan negara dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi.

2. Lembaga Keuangan

Semakin tingginya edukasi keuangan maka pengguna produk dan layanan jasa keuangan juga tinggi dan lembaga jasa keuangan berpotensi memiliki keuntungan yang tinggi. Masyarakat yang *well literate* jelas akan menggunakan produk dan layanan keuangan yang jelas lebih efisien dan inovatif sesuai kebutuhan dan kemampuan sehingga akan mampu meningkatkan persaingan positif antar lembaga dan nasabah yang memiliki skill keuangan dapat mengurangi gagal bayar.

3. Negara

Masyarakat yang *well literate* adalah target banyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, mengingat pentingnya literasi dan inklusi keuangan

sebagai langkah strategi yang diprioritaskan guna melakukan beberapa hal berikut:

- a. Peningkatkan pertumbuhan ekonomi,
- b. Pengentasan kemiskinan,
- c. Mengurangi ketimpangan pendapatan dan
- d. Meningkatkan stabilitas sistem keuangan

Melihat dari referensi di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui bagaimana Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) mampu mempengaruhi kesejahteraan keuangan (*financial well-being*) dan dilihat dari aspek usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, pendidikan, status pernikahan, status kesehatan, kepemilikan asset, status rumah, serta *social capital*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data longitudinal dari *Indonesia Family Life Survey* (IFLS). IFLS mengumpulkan data level individu, rumah tangga dan komunitas pertama kali tahun 1993, dilanjutkan tahun 1997, 2000, 2007 dan 2014. Data ini merepresentasikan 83% populasi di Indonesia yang hidup di 13 provinsi dari 26 pada tahun 1993. Pada tahun 2014, IFLS mengumpulkan data dari 16.204 rumah tangga dan 50.148 individu (Strauss, Witoelar dan Sikoki, 2016). Data individu dan rumah tangga mencakup informasi tentang kondisi sosial-ekonomi, seperti keuangan, kepemilikan asset, konsumsi, pendidikan, pekerjaan, agama, serta kesehatan.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *financial well-being* dengan indikator objektif dan subjektif. Untuk indikator objektif menggunakan proksi pendapatan, sedangkan untuk subjektif dengan indikator kepuasan yang berkaitan dengan pendapatan, situasi keuangan dan standar hidup (Hamilton, et al. 2017). Sementara itu, untuk variabel independen utama dalam penelitian ini adalah menggunakan tingkat inklusi keuangan atau penyediaan sarana layanan keuangan yang sesuai dan penyediaan produk yang cocok bagi kebutuhan masyarakat, implementasi terhadap *responsible finance*-melalui edukasi keuangan serta perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan variabel kontrol seperti karakteristik individu (seperti usia, jenis kelamin, dll.) dan rumah tangga (kepemilikan asset), dan *social capital*.

Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS), dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + \varepsilon$$

Dimana:

Y adalah *financial well-being*, X adalah inklusi keuangan, dan Z adalah variabel kontrol seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, agama, pendidikan, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, kepemilikan asset, status rumah, serta *social capital*.

Berikut merupakan data sebaran variabel yang disajikan dalam tabel:

Tabel. Statistik Deskriptif

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Pendapatan	1380939	2895510	0	90.000.000
Kepuasan hidup	3.353	0.784	1	5
Inklusi keuangan	0.322	0.467	0	1
Jenis kelamin	0.233	0.423	0	1
Status pernikahan	1.000	0.016	0	1
Usia	38.416	11.608	15	93
Pendidikan	8.736	4.552	0	16
Gejala penyakit	2.895	2.214	0	12
Kepemilikan rumah	0.796	0.403	0	1
Kepemilikan listrik	0.992	0.090	0	1
dummy_urban	0.547	0.498	0	1
Region	1.938	0.635	1	3

Sumber: IFLS, diolah.

Data distribusi di atas menunjukkan pendapatan memiliki nilai maksimum sebesar 90.000.000. dengan rerata pendapatan 1.380.939. dan tingkat kepuasan hidup dari populasi dalam 5 skala menunjukkan angka tingkat kepuasan 3.353. Dilihat dari data kepemilikan tabungan/ deposito/ saham sebagai bentuk inklusi keuangan populasi adalah 0.322 atau 32 persen. Jenis kelamin laki-laki dalam populasi adalah 23.3 persen sehingga data didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebesar 76.7 persen, sedangkan pada status pernikahan 100 persen menikah. Keseluruhan populasi secara umum masih dalam usia produktif yaitu 38 tahun dengan usia ter-endah 15 tahun. Bila dilihat secara umum tingkat Pendidikan populasi pada angka 8,7 dan bila disematkan pada jenjang Pendidikan berarti setara pada tingkat SLTP.

Kepemilikan gejala penyakit rata-rata populasi adalah 2.8 yang berarti mayoritas penyakit yang diderita 2-3 penyakit. Tempat hunian yang ditempati dengan rata-rata 79 persen milik sendiri dan sisanya tempat tinggal dengan status sewa, dan data ketersediaan listrik pada hunian populasi 99 persen telah teraliri listrik. Data urban yang diperoleh dari populasi antara perkotaan dan pedesaan cukup berimbang

yaitu 54.7 persen berasal dari perkotaan dan 45.3 dari pedesaan. Sementara asal wilayah populasi didominasi dari wilayah Jawa dan Bali dengan rata-rata nilai 1.93 dari data identifikasi (1) Sumatera, (2) Jawa dan Bali, (3) Lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table berikut menunjukkan hasil pengaruh indikator inklusi keuangan terhadap *financial well-being* dengan indikator pendapatan (model objektif) dan kepuasan (model subjektif).

Tabel. Hasil Estimasi OLS

Variabel	Model 1	Mode 2
	Pendapatan	Kepuasan
Inklusi keuangan	636,146*** (70,565.413)	0.1575*** (0.020)
Jenis kelamin	1025977*** (74,450.298)	-0.1196*** (0.021)
Status pernikahan	1174930 (1948709.645)	0.2835 (0.543)
Usia	22,269*** (2,996.210)	-0.0056*** (0.001)
Pendidikan	126,762*** (8,139.424)	0.0106*** (0.002)
Gejala penyakit	-30,123** (14,152.305)	-0.0341*** (0.004)
Kepemilikan rumah	144,250* (80,819.840)	0.1122*** (0.023)
Kepemilikan listrik	97,088 (347,637.155)	0.1292 (0.097)
dummy_urban	435,073*** (67,106.108)	0.0568*** (0.019)
Region	26,507 (49,766.279)	0.0383*** (0.014)
Constant	-2.6139e+06 (1986618.444)	2.9452*** (0.553)

Observations	7,789	7,789
R-squared	0.096	0.044

Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10

Indikator Pendapatan

Dari hasil penelitian, bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya yaitu dengan menunjukkan hasil R-squared sebesar 0.096 yang berarti variabel bebas di dalam model pendapatan mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 9% dan 91% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini.

Melihat hasil uji parsial (uji t) di atas nilai koefisien inklusi keuangan sebesar 636.146, dengan tingkat signifikansi sebesar 1%, hal ini menunjukkan pendapatan individu dengan tingkat inklusi keuangan yang baik memiliki pendapatan Rp. 636.146-lebih tinggi dibanding individu yang tidak terinklusi. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara inklusi keuangan terhadap *financial well-being* dengan indikator pendapatan. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik financial inklusi individu, maka akan semakin baik pula tingkat kesejahteraan keuangan individu tersebut.

Koefisien regresi jenis kelamin sebesar 1025977 dengan tingkat signifikansi 1%, hal ini menunjukkan rata-rata tingkat pendapatan laki-laki lebih tinggi Rp. 1.025.977 perbulan dibanding dengan perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa laki-laki cenderung memiliki kesejahteraan keuangan yang lebih baik dibanding dengan perempuan. Menariknya, dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara status pernikahan dengan pendapatan.

Koefisien regresi usia sebesar 22,269 dengan tingkat signifikansi 1%, hal ini menunjukkan setiap penambahan usia sebesar satu tahun, maka rata-rata pendapatannya akan naik sebesar Rp. 22.269- per-tahun. Artinya semakin tinggi usia seseorang, maka cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Koefisien regresi Pendidikan sebesar 126,762, dengan tingkat signifikansi 1%, hal ini menunjukkan semakin bertambah satu tahun lama pendidikan seseorang maka pendapatannya akan naik sebesar Rp. 126.762,-. Artinya semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat pendapatannya.

Koefisien regresi gejala penyakit sebesar -30,123, dengan tingkat signifikansi 5%, hal ini menunjukkan bahwa ketika individu memiliki satu penyakit lebih banyak maka pendapatannya cenderung menurun sebesar Rp. 30.123,-. Artinya terdapat

pengaruh negatif signifikan antara kondisi kesehatan individu dengan tingkat pendapatannya. Tentu ini berkaitan dengan tingkat produktifitas dan partisipasi kerja, semakin sehat individu maka akan semakin produktif dan memiliki partisipasi kerja yang lebih baik, dibanding dengan individu yang mengalami gangguan kesehatan.

Koefisien regresi kepemilikan rumah sebesar 144,250, dengan tingkat signifikansi sebesar 10%, hal ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki rumah cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibanding dengan individu lain yang tidak memiliki rumah. Dalam penelitian ini tidak ditemukan pengaruh signifikan antara kepemilikan listrik dengan pendapatan individu.

Koefisien regresi dummy urban sebesar 435,073 dengan tingkat signifikansi sebesar 1%, hal ini menunjukkan masyarakat kota memiliki pendapatan rata-rata lebih tinggi sebesar Rp. 435.073,- dibanding dengan masyarakat yang tinggal di desa. Artinya individu yang tinggal di perkotaan cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibanding dengan mereka yang tinggal di perdesaan. Penelitian ini tidak menemukan bukti yang kuat pengaruh lokasi tempat tinggal berdasarkan pulau dengan tingkat pendapatan.

Indikator Kepuasan

Dari hasil penelitian bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya yaitu dengan menunjukkan hasil R-Squared sebesar 0.044 yang berarti variabel bebas di dalam model kepuasan mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 4% dan 96% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini.

Koefisien regresi inklusi keuangan sebesar 0.1575, dengan tingkat signifikansi 1%, hal ini menunjukkan ketika individu terinklusi sebanyak satu kali maka akan meningkatkan kepuasan hidup sebesar 0.1575 skor dan begitupun sebaliknya. Artinya terdapat pengaruh sangat signifikan antara inklusi keuangan terhadap kepuasan hidup.

Koefisien regresi jenis kelamin sebesar -0.1196, dengan tingkat signifikansi 1%, hal ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah sebesar 0.1196 dibanding dengan perempuan. Dengan kata lain, individu perempuan cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Menariknya, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara status pernikahan dengan tingkat kepuasan hidup.

Koefisien regresi usia sebesar -0.0056, dengan tingkat signifikansi sebesar 1%, hal ini menunjukkan semakin bertambah satu tahun usia seseorang maka tingkat kepuasannya akan menurun sebesar 0.0056 skor. Dengan kata lain, usia berpengaruh

negatif dan signifikan terhadap kepuasan individu. Koefisien tingkat pendidikan sebesar 0.0106 dengan tingkat signifikansi 1%, hal ini menunjukkan semakin tinggi satu tahun tingkat pendidikan seseorang akan meningkatkan kepuasan hidup sebesar 0.0106 skor. Artinya individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kepuasan hidup yang lebih baik.

Koefisien regresi gejala penyakit sebesar -0.0341, dengan tingkat signifikansi 1%, hal ini menunjukkan bahwa memiliki satu penyakit lebih banyak, kepuasan hidup akan menurun sebesar 0.0341 skor. Artinya individu dengan kondisi kesehatan yang baik, cenderung memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi.

Koefisien regresi kepemilikan rumah sebesar 0,250, dengan tingkat signifikansi 1%, hal ini menunjukkan seseorang dengan status kepemilikan rumah sendiri memiliki tingkat kepuasan 0,250 hidup lebih tinggi dari status kepemilikan rumah sewa dan lainnya. Artinya, individu yang memiliki rumah cenderung memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi. Penelitian ini tidak menemukan pengaruh signifikan kepemilikan listrik terhadap kepuasan hidup.

Koefisien regresi dummy urban sebesar 0.0568, dengan tingkat signifikansi 1%, hal ini menunjukkan masyarakat kota memiliki tingkat kepuasan hidup 0.0568 skor lebih tinggi jika dibanding dengan masyarakat desa. Dengan kata lain, individu yang tinggal di kota cenderung memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi, barangkali ini berkaitan dengan ketersediaan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, hingga hiburan yang lebih baik. Koefisien regresi region sebesar 0.0383 dengan tingkat signifikansi 1%, hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepuasan hidup pada individu yang tinggal di wilayah Sumatra, Jawa dan Bali, serta lainnya. Dengan kata lain, terdapat perbedaan kepuasan hidup antar individu berdasarkan wilayah tempat tinggal.

Pengaruh Tingkat Inklusi Keuangan terhadap Pendapatan Individu dan Kepuasan Hidup

Variabel tingkat inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan individu dan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan hidup artinya, ketika inklusi keuangan individu meningkat maka juga akan meningkatkan pendapatan dan kepuasan hidup seseorang. Terinklusnya seseorang memungkinkan mereka mengakses bermacam-macam produk dan layanan jasa keuangan seperti pembiayaan/kredit usaha, memanfaatkan berbagai akses tabungan maupun asuransi untuk kegiatan produktif termasuk investasi. Pendapatan dan kepuasan hidup individu yang semakin baik berpotensi mendorong terwujudnya pembangunan manusia sebagai ukuran pembangunan suatu negara.

Sejalan dengan hasil penelitian Sarma dan Paris (2008), mengungkapkan bahwa tingkat pembangunan manusia dan tingkat inklusi keuangan memiliki hubungan positif yang cukup erat pada angka korelasi 0.74. artinya bahwa negara yang memiliki tingkat pembangunan manusia yang tinggi juga memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi pula.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat inklusi keuangan individu yang semakin baik dapat meningkatkan pendapatan dan kepuasan hidup individu yang semakin baik, sehingga hal ini mampu mendorong pembangunan manusia yang semakin tinggi di Indonesia.

Variabel kontrol jenis kelamin berpengaruh terhadap pendapatan individu terutama jenis kelamin laki-laki menunjukkan tingkat pendapatan lebih tinggi 1.025.977-rupiah per bulan dari jenis kelamin perempuan. Sedangkan tingkat kepuasan hidup laki-laki justru lebih rendah yang ditunjukkan dengan hasil negatif. Temuan ini menjelaskan kemampuan akses laki-laki terhadap produk keuangan lebih tinggi dari perempuan, namun tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah terjadi pada laki-laki. Hal ini disebabkan semakin banyaknya jumlah perempuan yang memiliki pendapatan sendiri, sehingga pola pengelolaan keuangan terutama dalam rumah tangga modern cenderung terpisah, yang berakibat tidak sedikit terjadi persaingan secara tidak langsung antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini tidak sejalan dengan dengan temuan Wardhoyo, et al. (2015) yang menyatakan meskipun laki-laki pada umumnya sebagai pencari nafkah utama yang berpeluang dalam akses keuangan, namun perempuan memiliki peluang yang lebih besar, mengingat perempuan bertugas dalam mengelola keuangan keluarga sehingga memiliki intensitas akses pada lembaga keuangan formal yang lebih besar dari laki-laki.

Variabel control status pernikahan tidak berpengaruh terhadap pendapatan maupun kepuasan hidup individu. Artinya ketika individu yang menikah ataupun tidak menikah tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan, secara umum asumsi status pernikahan tidak memiliki dampak secara matematis atau psikologis untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan hidup, bahkan terjadi cenderung menunda pernikahan untuk menambah pendapatan dalam rangka mempersiapkan jenjang pernikahan dengan asumsi kebahagiaan berumah tangga membutuhkan modal yang besar. Sejalan dengan hasil penelitian Wulandari, et al. (2014) bahwa setiap kenaikan status ekonomi sebesar -4.030 maka akan menurunkan rata-rata motif menikah dini sebesar 4.030 skor.

Variabel control usia berpengaruh terhadap pendapatan maupun kepuasan hidup individu. Artinya seiring bertambahnya usia satu tahun seseorang diiringi dengan kenaikan pendapatan sebesar 22.269-rupiah, namun dalam hal ini laki-laki yang usianya bertambah satu tahun justru diiringi dengan kepuasan hidup yang semakin menurun sebesar 0.0056 skor. Parameter usia diindikasikan semakin tinggi usia semakin tinggi peluang mengakses teknologi informasi yang dapat mengantarkan pada seseorang menuju akses pendapatan yang lebih luas. Arus digitalisasi informasi merupakan penyebab sebagian besar individu memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik terutama kelompok usia muda. Terjadinya penurunan kepuasan hidup menurut Diener (1999) dapat disebabkan oleh berbagai hal diantaranya tidak terpenuhinya harapan dan keinginan seseorang.

Variabel kontrol pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan dengan nilai koefisien sebesar 126,762, yang artinya semakin tinggi pendidikan seseorang dalam satu tahun kenaikan pendapatan sebesar 126,762-rupiah. Begitu pula tingkat pendidikan mampu mempengaruhi tingkat kepuasan hidup yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan meningkatkan kepuasan hidup sebesar 0.0106 skor. Kesadaran terhadap akses pendidikan pada masyarakat semakin tinggi, hal ini yang memunculkan animo positif masyarakat untuk melanjutkan studi hingga jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan seseorang mampu mendorong tingkat pendapatannya, termasuk meningkatkan kepuasan hidup seseorang, meski terkadang pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang tidak selalu sesuai dengan bidang pendidikan yang ditempuhnya.

Variabel kontrol gejala penyakit berpengaruh negatif terhadap pendapatan maupun kepuasan hidup individu. Artinya bahwa individu yang lebih sehat hanya dengan satu penyakit memiliki peluang pendapatan lebih tinggi, sehingga individu yang memiliki satu penyakit lebih banyak, berpotensi menurunkan pendapatan sebesar 30.123-rupiah. Seseorang dengan lebih dari satu penyakit juga dapat menyebabkan tingkat kepuasan hidup mengalami penurunan sebesar 0.0341 skor. Data indek pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM) terus menunjukkan peningkatan sampai tahun 2019, sehingga program-program pemerintah dalam bidang kesehatan diharapkan mampu menekan tingkat gejala penyakit pada masyarakat, sehingga angka IPKM dapat terus ditingkatkan.

Variabel kontrol kepemilikan rumah berpengaruh terhadap pendapatan dengan koefisien sebesar 144,250, artinya bahwa status kepemilikan rumah sendiri memiliki pendapatan lebih besar 144,250-rupiah dari status kepemilikan rumah sewa dan lainnya. Begitu pula kepemilikan rumah berpengaruh terhadap kepuasan hidup individu dengan tingkat kepuasan 0.250 lebih tinggi dibanding kepemilikan sewa. Kepemilikan aset atau memiliki rumah sendiri dalam kesejahteraan keluarga

merupakan faktor yang penting dan keluarga yang memiliki rumah sendiri lebih sejahtera dari pada kepemilikan rumah dengan sewa. Sejalan dengan ungkapan Fedderke dan Bogetic (2000), ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh dalam menunjang kegiatan ekonomi, seperti peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor manufaktur, sehingga kenaikan produktivitas tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan perkapita dari masyarakat miskin.

Variabel kontrol kepemilikan listrik tidak berpengaruh terhadap pendapatan maupun kepuasan hidup individu. Artinya kepemilikan listrik pada tempat tinggal belum memiliki dampak ekonomis yang akan meningkatkan pendapatan ataupun mempengaruhi tingkat kepuasan hidup individu. Meskipun fungsi listrik adalah sebagai kebutuhan pokok selain sandang, pangan, dan papan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Meidiana, dan Marhaeni bahwa ketersediaan listrik sebagai suatu wujud infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Penggunaan listrik secara efektif dapat mendorong pembangunan manusia dengan mengoptimalkan fungsi listrik untuk meningkatkan akses telekomunikasi, informasi dan hiburan serta akses pendapatan, dalam skala yang lebih luas dapat mendorong sektor bisnis yang berdaya ekonomi begitu pula sebaliknya. Permintaan atas listrik yang tinggi pada PT. PLN didominasi oleh pengguna perumahan yang banyak difungsikan sebatas untuk penerangan dan belum diperuntukkan bagi kegiatan yang bernilai ekonomi. Menurut Fedderke dan Bogetic (2000), Ketersediaan infrastruktur dalam bentuk ketersediaan listrik berpengaruh terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga meningkatkan produktivitasnya sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Variabel kontrol dummy urban berpengaruh terhadap pendapatan maupun kepuasan hidup individu, Besaran nilai perbedaan pendapatan penduduk kota dan desa sebesar 435,073-rupiah merupakan bentuk peluang atas akses kegiatan perekonomian di kota yang lebih tinggi. Gambaran hasil penelitian ini juga menegaskan masih terjadi ketimpangan antara kota dengan desa yang dilihat dari segi sosial ekonomi, infrastruktur, layanan keuangan seperti perbankan dan lembaga keuangan, pusat hiburan dan bermain. Hal ini merujuk pada temuan Sarma (2011) yang menjelaskan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi inklusi keuangan di suatu negara, yaitu seperti indikator sosial ekonomi, indikator infrastruktur, dan indikator perbankan. Semakin tinggi daya beli masyarakat kota maka semakin tinggi tingkat kepuasan hidup individu.

Variabel kontrol region tidak berpengaruh terhadap pendapatan, namun memiliki pengaruh terhadap kepuasan hidup individu. Artinya bila dilihat dari keberadaan wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di Indonesia tidak memiliki ketimpangan pendapatan yang berarti. Tingkat pendapatan secara merata tidak

menunjukkan perbedaan pendapatan masyarakat antar wilayah di baik di Sumatra, Jawa dan Bali, serta lainnya. Tingkat kepuasan hidup masyarakat berdasar region sangat dipengaruhi pendapatan yang diterima sesuai standar masing-masing wilayah, dan dalam penelitian ini semakin tinggi pendapatan akan diikuti tingkat kepuasan hidup individu dan begitun sebaliknya.

KESIMPULAN

Dari hasil pengolahan data dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan antar variabel yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan (1) Inklusi keuangan memberi pengaruh yang signifikan terhadap *financial well-being* masyarakat di Indonesia, (2) Variabel kontrol jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, gejala penyakit, kepemilikan rumah, *dummy_urban*, dan region masing-masing mampu mempengaruhi *financial well-being* masyarakat di Indonesia baik terhadap variabel pendapatan (model 1) maupun kepuasan hidup (model 2), (3) Variabel kontrol status pernikahan dan kepemilikan listrik masing masing tidak memiliki pengaruh terhadap *financial well-being* masyarakat di Indonesia.

Dari kesimpulan penelitian maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: (1) Penguatan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Indonesia diharapkan mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat secara berjenjang dan massif berdasar kriteria kelompok sasaran keuangan inklusif agar lebih efektif dan tepat sasaran. (2) Pemerintah melalui OJK maupun lembaga-lembaga pendidikan formal dapat melakukan kolaborasi dalam berbagai bentuk aktivitas yang mampu mendorong lebih cepat dan tepat untuk keberlanjutan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pembelajaran, penelitian maupun pengabdian. (3) Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi aktif dengan membuka diri terhadap akses produk dan layanan keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Atkinson, A. dan Messy, F.2012. “*Measuring Financial Literacy: Result of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study*”, OECD Working Paper on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15, OECD Publishing. Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/5k9csfs90fr4-en>.
2. Aulia, N., Yuliati, L. N., dan Muflikhati, I. 2009. Kesejahteraan Keuangan Keluarga Usia Pensiun: Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan Hari Tua, dan Kepemilikan Aset. *Jurnal Ilm. Kel. & Kons*, Vol. 12, No. 1, p. 38-51.
3. Bruggen, E. C., Hogreve, J., Holmlund, M., Kabadayi, S., dan Lofgren, M. 2017. Financial Well-being: A conceptualization and research agenda. *Journal of Business Research*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.03.013>.
4. Consultatif Group to Assist the Poor-Global Partnership for Financial Inclusion (CGAP-GPFI). 2011. “*Global Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion for the Poor: Toward Proportionate Standards and Guidance*”. GPFI. Washington, DC: CGAP, World Bank.
5. Diener, E. 1999. Introduction to the special section on the structure of emotion. *Journal of Personality and Social Psychology*, 76(5), 803–804. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.76.5.803>
6. Fedderke, J.W and Z. Bogetic. 2009. “Infrastructure and Growth in South Africa: Direct and Indirect Productivity Impacts of 19 Infrastructure Measures, 1970-2000.” *South African Journal of Economics*, 70(4), 611-46.
7. Grifoni, A. dan Messy, F. 2012, “Current status of National Strategies for Financial Education: A Comparative Analysis and Relevant Practices”, OECD Working Paper on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 16, OECD Publishing. Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/5k9bcwct7xmn-en>.
8. Hilgert, M., Hogarth, J., dan Beverly, S. 2003. Household Financial Management: The Connection Between Knowledge and Behavior. *Federal Reserve Bulletin*, July 309-322.
9. Klapper, L., Lusardi, Annamaria dan Panos, Georgios A. 2012. “Financial Literacy and the Financial Crisis”. Netspar Discussion Paper.
10. Lusardi, A., dan Mitchell, O. S. 2009. How Ordinary Consumers Make Complex Economic Decisions: Financial Literacy and Retirement Readiness. NBER Working Paper 15350. <http://www.nber.org/papers/w15350>
11. Lusardi, A., dan Tufano, P. 2009. Debt Literacy, Financial Experiences, and Overindebtedness. NBER Working Paper 14808.
12. Muir, K., Hamilton, M., Noone, J.H., Marjolin, A, Salignac, F., dan Saunders, O. 2017. Exploring Financial Wellbeing in the Australian Context. Centre for Social Impact & Social Policy Research Centre – University of New South Wales Sydney, for Financial Literacy Australia.
13. OJK. 2017. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017).
14. Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

15. Sarma, M and Pais, J. 2011. Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. *Journal of International Development* 23, 613-628
16. Strauss, J., Witoelar, F., dan Sikoki, B. 2016. The Fifth Wife of the Indonesia Family Life Survey: Overview and Field Report, Vol. 1. March 2016, WR-1143/1-NIA/NICHD.
17. Stromback, C., Lind, T., Skagerlund, K., Vastfjall, D., dan Tinghog, G. 2017. Does self-control predict financial behavior and financial well-being. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Vol. 14, p. 30-38.
18. Van Praag, B. M. S., & Frijters, P. (2003). The anatomy of subjective well-being. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 51(1), 29–49.
19. Wardhoyo, A., Indrawati, Y., Qori'ah, C, G. 2018. *Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Pustaka Abadi, Jember
20. World Bank, 2014a. 'Financial Education Programs and Strategies: Approaches and Availabel Resources". Januari 2014
21. Wulandari., & Sarwoprasodjo, S. (2015). Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Perdesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1). <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i1.9412>
22. <https://keuangan.kontan.co.id/news/ri-masuk-10-besar-perencana-kesejahteraan-keuangan>, diakses 5 Desember 2019.